IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rhizardi Khazainullah
NPP. 33.0250
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: Rhizardik44@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Frans Dione, S.IP., M.Si.
Email: frans_dione@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Research on the Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) has predominantly focused on policy communication, food security, educational impacts, and implementation at the school level. Limited studies have examined the implementation of the MBG policy at the regional government level using the policy implementation framework developed by Knill and Tosun (2020). This gap highlights the need to analyze how the MBG policy is implemented in Muara Enim Regency, South Sumatra Province.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meal Program policy in Muara Enim Regency, South Sumatra Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through semi-structured interviews and documentation. The analysis was guided by the policy implementation theory of Knill and Tosun (2020), focusing on four dimensions: policy design, monitoring structure, administrative capacity, and social acceptance. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model.* ***Result:*** *The findings indicate that the implementation of the MBG policy in Muara Enim Regency has generally been carried out effectively. In the policy design dimension, implementation was supported by clear regulations governing procedures, timelines, resource allocation, and intersectoral coordination. The monitoring structure dimension was reflected through formal supervisory mechanisms conducted by authorized institutions and supported by community involvement. Administrative capacity was demonstrated through the adequacy of human resources, budget availability, information technology utilization, and compliance with established standard operating procedures. Furthermore, social acceptance was evidenced by positive public perceptions, satisfaction with program implementation, perceived benefits, and broad community support for the program.* ***Conclusion:*** *The implementation of the Free Nutritious Meal Program policy in Muara Enim Regency has been carried out effectively through well-defined policy design, structured monitoring mechanisms, adequate administrative capacity, and strong social acceptance among the community.*

Keywords: *Administrative Capacity; Free Nutritious Meal Program; Policy Implementation; Social Acceptance; Supervisory Structure*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah banyak dilakukan dengan fokus pada aspek komunikasi kebijakan, ketahanan pangan, dampak pendidikan, serta implementasi program pada tingkat sekolah. Namun, penelitian yang menganalisis implementasi

kebijakan MBG pada tingkat daerah dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020) masih terbatas. Kesenjangan teoritis dan kontekstual tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020) yang meliputi dimensi desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim telah berjalan dengan baik. Pada dimensi desain kebijakan, implementasi didukung oleh kejelasan regulasi, mekanisme pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan koordinasi antarsektor. Pada dimensi struktur pengawasan, pelaksanaan program telah diawasi melalui mekanisme formal oleh lembaga yang berwenang. Dimensi kemampuan administratif menunjukkan tersedianya sumber daya manusia, dukungan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Pada dimensi penerimaan sosial, program memperoleh persepsi positif, tingkat kepuasan yang baik, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta dukungan terhadap keberlangsungan program. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim telah terlaksana dengan baik melalui desain kebijakan yang jelas, struktur pengawasan yang terorganisasi, kemampuan administratif yang memadai, dan penerimaan sosial yang positif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kapasitas Administratif; Makan Bergizi Gratis; Penerimaan Sosial; Struktur Pengawasan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu agenda prioritas berbagai negara karena kualitas manusia merupakan faktor utama yang menentukan daya saing bangsa di masa depan. Dalam perspektif global, pemenuhan gizi anak dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, kemampuan kognitif, produktivitas, dan kualitas pendidikan. Berbagai negara telah mengembangkan program pemberian makanan di sekolah sebagai instrumen kebijakan publik untuk meningkatkan status gizi sekaligus mendukung capaian pendidikan peserta didik. Program semacam ini terbukti mampu meningkatkan konsentrasi belajar, kehadiran siswa, serta kualitas kesehatan anak secara berkelanjutan (Bandoni et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan pemenuhan gizi tidak lagi dipandang sebagai isu kesehatan semata, melainkan bagian integral dari pembangunan manusia dan pembangunan nasional.

Di Indonesia, permasalahan gizi masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun prevalensi stunting nasional menunjukkan tren penurunan, pemerintah masih dihadapkan pada kebutuhan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, memperkuat kesehatan peserta didik, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Program ini memperoleh landasan kelembagaan melalui pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan program pemenuhan gizi secara nasional (Jati et al., 2025). Program MBG juga dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat yang terdiri atas peserta didik, balita,

dan kelompok rentan lainnya sehingga menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar yang pernah dilaksanakan pemerintah Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2025).

Sebagai sebuah kebijakan publik berskala nasional, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan pada tingkat daerah. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting yang menentukan apakah tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Knill dan Tosun (2020), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang meliputi desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Keempat aspek tersebut menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi indikator keberhasilan suatu kebijakan publik (Knill & Tosun, 2020).

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pelaksanaan program ini menjadi penting mengingat kondisi gizi masyarakat masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini, prevalensi stunting di Kabupaten Muara Enim mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 29,7 persen pada tahun 2021, menurun menjadi 22,78 persen pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 25,86 persen pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas gizi masyarakat masih menjadi agenda pembangunan yang penting untuk diwujudkan melalui berbagai kebijakan publik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.

Secara ideal, implementasi Program Makan Bergizi Gratis harus mampu menjamin terselenggaranya distribusi makanan yang memenuhi standar gizi, didukung oleh regulasi yang jelas, pengawasan yang terstruktur, kapasitas administratif yang memadai, serta penerimaan positif dari masyarakat. Implementasi yang berkualitas akan mendukung tercapainya tujuan program berupa peningkatan status gizi, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, implementasi yang tidak berjalan sesuai desain kebijakan berpotensi mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lendra, 2025).

Penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam, seperti formulasi kebijakan, komunikasi kebijakan, efektivitas program, dan implementasi pada tingkat sekolah (Jati et al., 2025; Nuradhawati, 2025). Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat kabupaten dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020) masih relatif terbatas. Kesenjangan teoritis tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan pada tingkat daerah. Selain itu, Kabupaten Muara Enim sebagai lokus penelitian memiliki karakteristik sosial dan kebutuhan pembangunan yang berbeda dengan daerah lain sehingga menghadirkan kesenjangan kontekstual yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan dimensi desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kajian mengenai program pemberian makanan bergizi di sekolah telah berkembang secara luas pada tingkat internasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program makan sekolah memiliki kontribusi terhadap peningkatan status gizi peserta didik, kesehatan anak, dan kualitas pembelajaran. Selain itu, tata kelola program dan kapasitas kelembagaan juga menjadi aspek yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Temuan lain menunjukkan bahwa efektivitas program makan sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan (Bandoni et al., 2024; Gelli et al., 2023; Aurino et al., 2024).

Pada konteks nasional, penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan fokus kajian yang beragam. Beberapa penelitian menempatkan MBG sebagai instrumen peningkatan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, sementara penelitian lainnya mengkaji pelaksanaan program pada tingkat satuan pendidikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi dan kualitas pembelajaran peserta didik. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak program atau implementasi pada level sekolah sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pada tingkat pemerintahan daerah (Fatimah et al., 2024; Abdillah & Bachtiar, 2025; Febryanti, 2025).

Perbandingan antara penelitian internasional dan nasional menunjukkan adanya perbedaan fokus kajian. Penelitian internasional lebih banyak menyoroti hubungan antara program makan sekolah dengan pembangunan manusia, perlindungan sosial, dan tata kelola kebijakan publik. Sebaliknya, penelitian nasional cenderung berfokus pada aspek manfaat program, pelaksanaan teknis, serta dampak terhadap pendidikan dan gizi peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian implementasi kebijakan MBG sebagai sebuah kebijakan publik masih relatif terbatas, khususnya yang menggunakan perspektif implementasi kebijakan secara komprehensif (Bandoni et al., 2024; Gelli et al., 2023; Fatimah et al., 2024).

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan yang berorientasi pada model Edwards III, Mazmanian dan Sabatier, maupun pendekatan tata kelola program pendidikan. Padahal, teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Knill dan Tosun menawarkan perspektif yang lebih komprehensif melalui dimensi desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Penggunaan teori tersebut dalam kajian Program Makan Bergizi Gratis masih relatif terbatas sehingga membuka ruang pengembangan penelitian pada aspek implementasi kebijakan publik (Knill & Tosun, 2020; Dione, 2023; Pitono, 2022).

Dari sisi lokus penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat sekolah maupun wilayah tertentu yang berfokus pada pelaksanaan program dalam lingkup terbatas. Penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat kabupaten sebagai unit pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan nasional masih relatif sedikit ditemukan. Padahal, karakteristik daerah, kapasitas kelembagaan, serta dinamika pelaksanaan kebijakan pada tingkat daerah dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (Abdillah & Bachtiar, 2025; Febryanti, 2025; Dione, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada masih terbatasnya penelitian yang menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat kabupaten dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada dampak program, komunikasi kebijakan, ketahanan pangan, maupun implementasi pada tingkat sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan melalui dimensi desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoritis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik (Knill & Tosun, 2020).

1.3 Urgensi Penelitian

Secara teoritis, penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki urgensi yang tinggi karena implementasi merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan studi kebijakan publik kontemporer, implementasi tidak lagi dipahami sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai rangkaian aktivitas yang melibatkan desain kebijakan, mekanisme pengawasan, kapasitas kelembagaan, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Kajian implementasi kebijakan menjadi semakin penting karena keberhasilan suatu program publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menerjemahkan tujuan kebijakan ke

dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, analisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui dimensi desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial menjadi relevan untuk memperkaya pengembangan teori implementasi kebijakan publik, khususnya pada konteks kebijakan sosial di Indonesia (Knill & Tosun, 2020; Knill, 2024).

Secara praktis, penelitian ini penting dilakukan karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program ini melibatkan berbagai aktor pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sehingga implementasinya memerlukan koordinasi, kapasitas administratif, dan tata kelola yang baik. Penelitian mengenai implementasi kebijakan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana suatu kebijakan dijalankan dalam praktik pemerintahan serta bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas implementasi kebijakan publik memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan program pembangunan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Kristian, 2023; Husnika, 2025).

Dari perspektif kebijakan, penelitian ini memiliki urgensi karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai kebijakan nasional yang dilaksanakan hingga tingkat daerah, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas implementasinya. Oleh karena itu, penelitian implementasi kebijakan menjadi penting untuk memahami bagaimana tujuan kebijakan nasional dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan pada tingkat daerah. Literatur kebijakan publik menunjukkan bahwa implementasi yang efektif akan mendukung tercapainya tujuan kebijakan serta meningkatkan legitimasi pemerintah dalam penyelenggaraan program publik (Mansur, 2021; Wee, 2025).

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh kebutuhan pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan kebijakan publik di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan berbagai program nasional sehingga kajian mengenai implementasi kebijakan pada tingkat daerah memiliki nilai akademik dan praktis yang tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan pembangunan manusia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan pada level pemerintahan daerah melalui penggunaan perspektif implementasi kebijakan yang menekankan aspek desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial sebagai dimensi utama keberhasilan implementasi kebijakan publik (Dione, 2023; Pitono, 2022; Knill & Tosun, 2020).

1.4 Penelitian Terdahulu

Program pemberian makanan di sekolah telah menjadi salah satu instrumen kebijakan publik yang banyak diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan peserta didik. Kajian mengenai program makan sekolah di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan status gizi, partisipasi pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, keberhasilan program juga dipengaruhi oleh tata kelola kebijakan dan kapasitas institusi pelaksana dalam mengelola program secara berkelanjutan (Gelli et al., 2023).

Penelitian lain yang mengkaji program makan sekolah melalui pendekatan systematic literature review menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Studi tersebut menempatkan program makan sekolah sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia dan perlindungan sosial yang memiliki dampak luas terhadap kualitas

pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada pembelajaran kebijakan dari berbagai negara dan belum secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan pada tingkat pemerintahan daerah (Sari et al., 2025).

Kajian internasional lainnya menunjukkan bahwa program makan bergizi sebagai kebijakan sosial memiliki peran dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Implementasi program dipandang sebagai bagian dari kebijakan pembangunan manusia yang bertujuan memperkuat kualitas generasi masa depan. Meskipun demikian, fokus penelitian masih berada pada manfaat program dan belum menelaah implementasi kebijakan dari perspektif administrasi publik secara komprehensif (Fadli et al., 2026).

Pada konteks nasional, penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa program tersebut memiliki relevansi yang tinggi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia. Kajian yang dilakukan pada wilayah Indonesia Timur menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pemerataan akses gizi. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek ketahanan pangan sehingga belum mengkaji implementasi kebijakan sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan daerah (Fatimah et al., 2024).

Penelitian nasional lainnya menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan keberlanjutan pendidikan peserta didik. Program tersebut dipandang memiliki potensi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas gizi dan pembelajaran. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berorientasi pada dampak program sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pada tingkat daerah sebagai pelaksana utama kebijakan nasional (Qomarrullah et al., 2025).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian internasional maupun nasional masih berfokus pada dampak program, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan manfaat pendidikan dari program makan sekolah. Penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat kabupaten dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang menekankan dimensi desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoritis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik (Knill & Tosun, 2020).

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dari aspek objek penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, teori yang digunakan, dan temuan penelitian. Dari aspek objek penelitian, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai Program Makan Bergizi Gratis lebih banyak mengkaji dampak program terhadap ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, maupun komunikasi kebijakan, sedangkan penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis masih relatif terbatas (Fatimah et al., 2024; Qomarrullah et al., 2025; Sari et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan implementasi kebijakan sebagai fokus utama kajian.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada aspek lokasi dan metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang hingga saat ini masih terbatas menjadi lokus penelitian terkait implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat sekolah maupun daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda dengan Kabupaten Muara Enim (Abdillah & Bachtiar, 2025; Febryanti, 2025). Dari aspek metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan berdasarkan kondisi empiris yang terjadi pada lokus penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap proses implementasi kebijakan pada tingkat pemerintahan daerah.

Dari aspek teori, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Knill dan Tosun yang menekankan empat dimensi utama, yaitu desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Penggunaan teori tersebut masih relatif jarang ditemukan dalam penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia yang umumnya menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III atau Mazmanian dan Sabatier (Knill & Tosun, 2020). Sementara itu, kebaruan temuan penelitian ini terletak pada diperolehnya gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim berdasarkan keempat dimensi tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan melalui desain kebijakan yang jelas, struktur pengawasan yang berjalan, kemampuan administratif yang memadai, serta penerimaan sosial yang positif dari masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat pemerintahan daerah (Knill & Tosun, 2020; Dione, 2023; Pitono, 2022).

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan serta menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari informan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus penelitian pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta perangkat daerah dan instansi terkait. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan prioritas nasional yang telah diimplementasikan di Kabupaten Muara Enim serta relevansinya dengan tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan program tersebut.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Informan terdiri atas unsur Badan Gizi Nasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah daerah, pihak sekolah penerima manfaat program, serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan berdasarkan perspektif pelaksana maupun penerima manfaat program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, laporan pelaksanaan program, data statistik, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi pelaksanaan program di lapangan sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan melalui proses seleksi, penyederhanaan, dan pengelompokan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi dan analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis.

Uji validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan hasil penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data dan informasi yang diperoleh guna memastikan kesesuaian antara fakta lapangan dengan data yang digunakan dalam penelitian. Melalui proses tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu menggambarkan implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim secara objektif dan komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Desain Kebijakan

Tabel 1.
Komponen Desain Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim

Komponen	Deskripsi
Dasar Kebijakan	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
Sasaran Program	Peserta didik, balita, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat sesuai ketentuan BGN
Pelaksana Program	Badan Gizi Nasional, SPPG, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan

Standar Pelayanan	Menu makanan sesuai standar gizi yang ditetapkan BGN
Mekanisme Distribusi	Penyediaan, pengolahan, dan pendistribusian makanan melalui SPPG
Koordinasi	Dilaksanakan antara BGN, pemerintah daerah, sekolah, dan pihak terkait

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2026.

Desain kebijakan merupakan dimensi yang menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan dirancang secara jelas sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim didukung oleh desain kebijakan yang telah dirumuskan secara jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan petunjuk teknis penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Kejelasan regulasi tersebut memberikan arah pelaksanaan program mulai dari penentuan sasaran penerima manfaat, standar penyediaan makanan bergizi, mekanisme distribusi, hingga pembagian tugas antarinstansi yang terlibat dalam penyelenggaraan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran Program Makan Bergizi Gratis telah ditetapkan secara jelas sehingga memudahkan pelaksana dalam menentukan kelompok penerima manfaat. Selain itu, standar menu makanan yang digunakan dalam program telah mengacu pada ketentuan gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Kejelasan standar tersebut menunjukkan bahwa desain kebijakan tidak hanya mengatur siapa yang menerima manfaat program, tetapi juga mengatur kualitas layanan yang harus diberikan kepada penerima manfaat. Dengan adanya standar yang telah ditetapkan, pelaksanaan program memiliki pedoman yang sama sehingga dapat meminimalkan perbedaan interpretasi di tingkat pelaksana.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa desain kebijakan Program Makan Bergizi Gratis telah mengatur mekanisme distribusi makanan secara sistematis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan sebagai unit operasional yang bertanggung jawab terhadap proses penyediaan dan pendistribusian makanan kepada kelompok sasaran. Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara perencanaan program dengan pelaksanaan di lapangan sehingga tujuan kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan operasional yang terstruktur. Selain itu, pembagian peran antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, sekolah, dan SPPG menunjukkan bahwa desain kebijakan telah mengakomodasi kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, desain kebijakan yang jelas menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi. Kebijakan yang memiliki tujuan, sasaran, prosedur, dan pembagian kewenangan yang jelas akan lebih mudah diterjemahkan ke dalam tindakan administratif oleh organisasi pelaksana. Desain kebijakan yang baik juga mampu mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan program karena seluruh aktor yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan (Knill & Tosun, 2020).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberian makanan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kejelasan desain kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan program. Kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas, standar pelayanan yang terukur, dan mekanisme pelaksanaan yang terstruktur cenderung lebih mudah diimplementasikan dibandingkan kebijakan yang memiliki ketidakjelasan dalam pengaturannya (Gelli et al., 2023). Dengan demikian, desain kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa aspek regulasi, sasaran, standar pelayanan, mekanisme distribusi, dan koordinasi telah dirancang secara jelas sehingga mendukung pelaksanaan program sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

3.2 Struktur Pengawasan

Tabel 2.
Struktur Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim

Unsur Pengawasan	Bentuk Pengawasan
Badan Gizi Nasional (BGN)	Pengawasan terhadap pelaksanaan program sesuai petunjuk teknis dan standar ya ditetapkan
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	Pengawasan proses penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan
Pemerintah Daerah	Monitoring pelaksanaan program pada wilayah Kabupaten Muara Enim
Satuan Pendidikan	Pengawasan penerimaan dan pendistribusian makanan kepada peserta didik
Masyarakat	Penyampaian informasi dan umpan balik terhadap pelaksanaan program

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2026.

Struktur pengawasan merupakan dimensi yang menunjukkan bagaimana mekanisme kontrol dan pemantauan dilaksanakan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim, struktur pengawasan telah dibentuk melalui keterlibatan berbagai aktor yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh institusi yang berada pada tingkat pusat, tetapi juga melibatkan unit pelaksana program di daerah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan sebagai lokasi penerima manfaat program. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan secara berjenjang sehingga setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipantau secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional berperan sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan program dengan regulasi dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Pada tingkat operasional, pengawasan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab memastikan proses penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat berjalan sesuai standar. Adanya pembagian tugas yang jelas dalam struktur pengawasan menunjukkan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program memiliki mekanisme kontrol yang terintegrasi sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh lembaga formal, hasil penelitian menunjukkan bahwa satuan pendidikan juga memiliki peran dalam memantau pelaksanaan program pada tingkat penerima manfaat. Sekolah berfungsi sebagai pihak yang memastikan makanan diterima oleh peserta didik sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi lokasi distribusi program, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan yang mendukung keberlangsungan implementasi kebijakan. Keberadaan pengawasan pada tingkat sekolah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara pelaksana program dengan kelompok sasaran kebijakan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk memberikan informasi dan umpan balik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Meskipun pengawasan masyarakat bersifat lebih sederhana dibandingkan pengawasan formal yang dilakukan oleh institusi pemerintah, keberadaannya memberikan tambahan informasi mengenai pelaksanaan program di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengawasan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan partisipasi publik sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, struktur pengawasan memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan

yang telah dirumuskan. Pengawasan memungkinkan pemerintah memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan sekaligus menjadi sarana untuk memastikan kepatuhan pelaksana terhadap standar yang telah ditetapkan. Struktur pengawasan yang jelas akan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program karena setiap aktor memiliki tanggung jawab yang dapat diidentifikasi secara jelas (Knill & Tosun, 2020).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberian makanan di sekolah sangat dipengaruhi oleh sistem pengawasan yang mampu memastikan kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan. Pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang dan melibatkan berbagai aktor akan meningkatkan konsistensi implementasi kebijakan serta mendukung tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan (Bandoni et al., 2024). Dengan demikian, struktur pengawasan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim menunjukkan adanya mekanisme pengawasan formal dan partisipatif yang mendukung pelaksanaan program sesuai dengan desain kebijakan yang telah ditetapkan.

3.3 Kemampuan Administratif

Tabel 3.
Komponen Kemampuan Administratif dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim

Komponen	Kondisi Implementasi
Sumber Daya Manusia	Tersedia personel yang memiliki tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi pelaksana program
Anggaran	Didukung alokasi anggaran yang menunjang penyelenggaraan program
Sistem Informasi	Memanfaatkan teknologi informasi untuk administrasi dan pelaporan program
Standar Operasional Prosedur	Pelaksanaan program mengacu pada SOP yang telah ditetapkan
Koordinasi Administratif	Dilaksanakan melalui hubungan kerja antarinstansi yang terlibat dalam program

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2026.

Kemampuan administratif merupakan dimensi yang menunjukkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan kebijakan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, sistem informasi, dan prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan program. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim, kemampuan administratif menjadi aspek penting karena program melibatkan berbagai aktivitas administratif mulai dari perencanaan, pendataan penerima manfaat, pengelolaan distribusi makanan, pelaporan pelaksanaan program, hingga koordinasi antarinstansi yang terlibat. Oleh karena itu, kemampuan administratif menjadi fondasi yang mendukung keberlangsungan implementasi kebijakan secara efektif dan terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis didukung oleh sumber daya manusia yang telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan struktur organisasi pelaksana program. Keberadaan personel yang bertugas dalam proses administrasi, pengelolaan program, pengawasan, dan distribusi makanan menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Pembagian tugas tersebut memungkinkan setiap tahapan pelaksanaan program dapat dijalankan sesuai fungsi masing-masing sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan.

Selain sumber daya manusia, kemampuan administratif juga tercermin dari dukungan anggaran yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memperoleh dukungan pembiayaan yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional program. Ketersediaan anggaran memberikan kepastian bagi pelaksana program dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga proses implementasi dapat berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dukungan anggaran juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memastikan keberlangsungan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan prioritas nasional.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memanfaatkan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan administrasi dan pelaporan program. Pemanfaatan teknologi informasi membantu proses pengelolaan data penerima manfaat, penyusunan laporan, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam program. Penggunaan sistem informasi tersebut menunjukkan adanya upaya modernisasi administrasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, implementasi program juga menunjukkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Kepatuhan terhadap SOP memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksana program sehingga setiap aktivitas administrasi dan operasional dapat dilaksanakan secara konsisten.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kemampuan administratif merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang memadai, dukungan anggaran yang cukup, sistem informasi yang baik, dan prosedur kerja yang jelas akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Kapasitas administratif yang kuat juga memungkinkan pelaksana kebijakan menjalankan fungsi pelayanan secara lebih efektif dan akuntabel (Knill & Tosun, 2020).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kapasitas administratif dan kapasitas kelembagaan memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan implementasi program publik. Organisasi yang memiliki kemampuan administratif yang baik cenderung lebih mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta menjaga konsistensi pelaksanaan program dalam jangka panjang (Kristian, 2023; Husnika, 2025). Dengan demikian, kemampuan administratif dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia, anggaran, sistem informasi, dan kepatuhan terhadap prosedur telah mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan.

3.4 Penerimaan Sosial

Tabel 4.
Indikator Penerimaan Sosial Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim

Indikator	Temuan Penelitian
Persepsi Masyarakat	Program dipandang memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi peserta didik
Kepuasan Penerima Manfaat	Penerima manfaat menunjukkan tingkat kepuasan yang baik terhadap pelaksanaan program
Manfaat yang Dirasakan	Program mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dan proses pembelajaran peserta didik
Dukungan Masyarakat	Masyarakat mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

Penerimaan Kebijakan	Program diterima sebagai kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2026.

Penerimaan sosial merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Dalam konteks implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim, penerimaan sosial menjadi penting karena keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan dan pelaksanaannya, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut diterima oleh kelompok sasaran. Semakin tinggi tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan, semakin besar peluang kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang positif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini dipandang sebagai kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi yang mendukung kebutuhan gizi harian. Persepsi positif tersebut menunjukkan bahwa tujuan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat. Kesesuaian antara tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan memperoleh legitimasi sosial yang baik dalam pelaksanaannya.

Selain persepsi positif, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerima manfaat merasa puas terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kepuasan tersebut tercermin dari pandangan bahwa program memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik. Masyarakat menilai bahwa penyediaan makanan bergizi melalui program ini mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik sekaligus memberikan manfaat bagi aktivitas belajar di sekolah. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan kelompok sasaran.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan adanya dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Dukungan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat menerima program sebagai kebijakan publik yang memiliki nilai manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan juga memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berlangsung pada aspek administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi dari lingkungan sosial tempat kebijakan tersebut dijalankan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, penerimaan sosial merupakan dimensi yang menunjukkan sejauh mana kelompok sasaran menerima dan mendukung kebijakan yang diimplementasikan. Kebijakan yang memperoleh tingkat penerimaan sosial yang tinggi cenderung lebih mudah dilaksanakan karena mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sebaliknya, rendahnya penerimaan sosial dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan karena masyarakat tidak sepenuhnya menerima tujuan dan substansi kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, penerimaan sosial menjadi salah satu dimensi penting dalam menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan publik (Knill & Tosun, 2020).

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberian makanan di sekolah sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Program yang mampu memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh penerima manfaat akan memperoleh tingkat legitimasi yang lebih tinggi serta dukungan yang lebih kuat dari masyarakat (Aurino et al., 2024; Bandoni et al., 2024).

Dengan demikian, penerimaan sosial terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa masyarakat menerima program secara positif, merasakan manfaat dari pelaksanaan program, serta memberikan dukungan terhadap keberlangsungan kebijakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan melalui empat dimensi utama, yaitu desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Pada dimensi desain kebijakan, pelaksanaan program didukung oleh regulasi, sasaran, mekanisme distribusi, dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada dimensi struktur pengawasan, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada dimensi kemampuan administratif, implementasi program didukung oleh sumber daya manusia, dukungan anggaran, sistem informasi, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Sementara itu, pada dimensi penerimaan sosial, masyarakat menunjukkan persepsi positif, tingkat kepuasan yang baik, serta dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Implementasi kebijakan publik pada tingkat daerah memerlukan keterpaduan antara desain kebijakan, kapasitas kelembagaan, tata kelola pemerintahan, serta penerimaan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Dalam konteks tersebut, berbagai kajian dosen IPDN menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam mekanisme pelaksanaan yang terukur dan akuntabel (Pitono, 2013; Simangunsong, 2021; Dione, 2023; Pambayun, 2022; Harahap, 2023). Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian internasional yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas formulasi kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, struktur pengawasan, dan legitimasi sosial yang diperoleh dari masyarakat penerima manfaat (Gelli et al., 2023; Aurino et al., 2024; Bandoni et al., 2024; Knill & Tosun, 2020; Knill, 2024). Dengan demikian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis dapat dipahami sebagai proses kebijakan yang melibatkan hubungan antara institusi pelaksana, mekanisme administrasi, dan masyarakat sebagai penerima manfaat sehingga keberhasilan program tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga pada kemampuan sistem pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan terstruktur (Pitono, 2013; Dione, 2023; Gelli et al., 2023; Knill & Tosun, 2020).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim telah berlangsung sesuai dengan dimensi implementasi kebijakan yang dikemukakan dalam teori Knill dan Tosun. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, efektivitas struktur pengawasan, kemampuan administratif organisasi pelaksana, dan tingkat penerimaan sosial masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Keterpaduan keempat dimensi tersebut memungkinkan tujuan kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan administratif yang terstruktur dan diterima oleh kelompok sasaran kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun dalam menjelaskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat pemerintahan daerah (Knill & Tosun, 2020).

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberian makanan bergizi sangat dipengaruhi oleh kejelasan desain kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan penerimaan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Penelitian mengenai program makan sekolah di berbagai negara menunjukkan bahwa desain kebijakan yang jelas dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program secara efektif (Gelli et al., 2023). Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap program makan bergizi berkontribusi terhadap keberlanjutan pelaksanaan kebijakan publik pada sektor kesehatan dan pendidikan (Bandoni et al., 2024). Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian nasional yang menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat (Fatimah et al., 2024).

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, sedangkan penelitian ini menempatkan implementasi kebijakan sebagai fokus utama analisis. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun yang masih relatif jarang digunakan dalam penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Penggunaan teori tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan implementasi kebijakan secara lebih komprehensif melalui dimensi desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial (Qomarrullah et al., 2025; Sari et al., 2025).

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengayaan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi kebijakan publik dapat dianalisis secara komprehensif melalui keterkaitan antara desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Temuan tersebut tidak hanya memperkuat pengembangan teori implementasi kebijakan, tetapi juga memperluas literatur mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan prioritas nasional dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia (Knill & Tosun, 2020; Dione, 2023).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan melalui dimensi desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Pada dimensi desain kebijakan, implementasi program didukung oleh kejelasan regulasi, sasaran, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian kewenangan antarinstansi yang terlibat. Pada dimensi struktur pengawasan, pelaksanaan program telah diawasi melalui mekanisme pengawasan formal yang melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Pada dimensi kemampuan administratif, implementasi program didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, pemanfaatan sistem informasi, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Sementara itu, pada dimensi penerimaan sosial, masyarakat menunjukkan persepsi yang positif, tingkat kepuasan yang baik, serta dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Dengan demikian, implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan sesuai dengan dimensi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Knill dan Tosun, yaitu desain kebijakan, struktur pengawasan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Keterkaitan antar dimensi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis telah berlangsung sebagai suatu proses implementasi

kebijakan publik yang terstruktur dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Dari aspek waktu, penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu yang terbatas sehingga pengamatan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis hanya menggambarkan kondisi pada periode penelitian berlangsung. Dari aspek lokasi, penelitian difokuskan pada Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sehingga hasil penelitian mencerminkan karakteristik implementasi kebijakan pada lokus tersebut dan belum dapat menggambarkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah lain yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda. Dari aspek data, penelitian mengandalkan data yang tersedia pada saat penelitian dilakukan, baik yang diperoleh melalui dokumentasi maupun informasi dari instansi terkait. Selain itu, dari aspek informan, penelitian hanya melibatkan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga informasi yang diperoleh terbatas pada perspektif pelaksana dan penerima manfaat yang menjadi bagian dari penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup dan konteks penelitian yang telah ditetapkan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan implementasi kebijakan antar daerah. Penelitian komparatif pada beberapa kabupaten atau provinsi akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi implementasi kebijakan serta memperkaya kajian implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian mendatang dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang sehingga mampu menggambarkan dinamika implementasi kebijakan secara berkelanjutan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan pelaksanaan program dari waktu ke waktu.

Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas sumber data dan jumlah informan yang terlibat dengan mencakup berbagai kelompok pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis. Penggunaan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau mixed methods, juga dapat dipertimbangkan untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memperkaya literatur implementasi kebijakan publik sekaligus memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada berbagai konteks daerah dan kelompok masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Badan Gizi Nasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, R., & Bachtiar, A. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis: Studi pada SMA Negeri 2 Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*. https://iicls.org/index.php/jer/article/view/820

Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan, 4*(3), 362–368. https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368

Ariani, F. (2025). Kesiapan sekolah dalam implementasi program makan bergizi gratis. *Jurnal Pusaka Administrasi Negara*. https://jak.lan.go.id/jurnalpusaka/article/view/819

Aurino, E., Tranchant, J. P., & Diallo, A. S. (2024). School feeding and educational outcomes in developing countries: A systematic review. *World Development, 176*, 106512. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106512

Azzahra, A. (2026). Analisis permasalahan makan bergizi gratis dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Didaktik*. https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/8960

Badan Gizi Nasional. (2025). *Petunjuk teknis penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. Badan Gizi Nasional.

Bandoni, D. H., Jaime, P. C., & Louzada, M. L. C. (2024). School feeding programs and their contributions to child nutrition and educational outcomes. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 21*(3), 1124. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21294742/

Dione, F. (2023). *Implementasi kebijakan publik dalam pemerintahan daerah*. IPDN Press.

Fadli, Z., et al. (2026). Social policy, food security, and educational motivation: The implementation of Indonesia's free nutritious meal program. *Baileo: Journal of Social and Political Sciences*. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/baileofisip/article/view/21733

Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, Qamal, & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia Timur: Tantangan, implementasi, dan ketahanan pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation, 4*(1), 14–21. https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641

Febryanti, I. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG): Studi kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pendidikan, 6*(1), 44–57. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5171934

Gelli, A., Aurino, E., Folson, G., & Masset, E. (2023). School meals and social protection: Evidence from low- and middle-income countries. *Food Policy, 118*, 102474. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102474

Harahap, A. S. (2023). *Governance dan administrasi pemerintahan daerah*. IPDN Press.

Husnika, A. A. (2025). Implementasi kebijakan publik dalam peningkatan pelayanan publik. *National Public Administration Seminar Proceedings*. https://fisip.uinsgd.ac.id/conferences/index.php/NAPAS/article/view/827

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). *Pedoman makan bergizi gratis di satuan pendidikan*. Kemendikdasmen.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Panduan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis*. Kemendikbudristek.

Knill, C. (2024). How policy growth affects policy implementation. *Journal of European Public Policy, 31*(4), 1037–1056. https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2158208

Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction* (2nd ed.). Red Globe Press.

Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Public Administration and Innovation Journal*. https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/155

Lendra, I. W. (2025). Kebijakan makan bergizi gratis dan relevansinya terhadap pembangunan sumber daya manusia. *Asian Journal of Social Humanities*. https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1252

Mansur, J. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *At-Tawassuth, 6*(2), 153–170. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7713

Pambayun, K. G. (2022). *Inovasi dan tata kelola pemerintahan daerah*. IPDN Press.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Pitono, A. (2013). *Manajemen pemerintahan daerah*. Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.

Pitono, A. (2022). *Kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah*. IPDN Press.

Qomarrullah, R., Nurhayati, E., Rahman, A., & Hidayat, M. (2025). Dampak jangka panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *International Journal of Indonesian Publication, 5*(2), 130–137. https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/660

Risnawati, E. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam peningkatan efektivitas pembelajaran. *Jurnal Pengabdian dan Implementasi Manajemen*. https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1380

Sari, N. H., Lionardo, A., Thamrin, M. H., & Putra, R. (2025). Free school meals policy as a learning framework for MBG in Indonesia: A systematic literature review. *Eduvest: Journal of Universal Studies, 5*(10). https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/52310

Simangunsong, F. (2021). *Kepemimpinan dan inovasi pemerintahan*. IPDN Press.

Suprapto, D. (2026). Implementasi kebijakan dan tata kelola makanan bergizi gratis dalam pembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*. https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/1579

UNICEF. (2024). *Nutrition and learning: Ensuring healthy meals for every child*.

Wee, G. (2025). Public administration, governance, and policy integration. *Journal of Policy Studies, 40*(4), 79–95. https://www.e-jps.org/archive/view_article?pid=jps-40-4-79

World Health Organization. (2022). *School meals and nutrition: Global guidelines*.

Widyasari, Y. S., Larasati, A., & Alam, Y. W. (2025). Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *Journal of Social Science Research, 5*(4), 1727–1736. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20023